

Komunitas Pedesaan di Malaysia : Masalah Dan Tantangan

Rural Community Development in Malaysia: Problems And Challenges

Teuku Afrizal

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro, Indonesia

Submitted : February 2021 ; Reviewed : March 2021 ; Accepted : March 2021

*Corresponding Email : teukurian@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Pengembangan komunitas merupakan upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup masyarakat. Program Gerakan Desa Wawasan adalah sebuah program dengan menitikberatkan pada pengembangan pembangunan manusia pedesaan menuju desa yang lebih maju, menarik dan menguntungkan. Walaupun dalam implementasinya pengembangan komunitas berjalan dengan lancar dan sukses. Namun demikian, pasca suksesnya perlu dipertahankan dan berkelanjutan. Artikel ini fokus pada masalah dan tantangan dalam konteks pengembangan komunitas pedesaan melalui program Gerakan Desa Wawasan. Artikel ini mengambil studi kasus di Desa Bayangan Keningau, Sabah Malaysia. Pengumpulan data dijalankan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan observasi. Disamping dokumentasi dari bahan-bahan yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Artikel menemukan beberapa faktor penting yang menjadi masalah dan tantangan pasca suksesnya implementasi program Gerakan Desa Wawasan di Desa Bayangan Keningau. Ini meliputi; (i) tiadanya aksi lanjutan dari pemerintah setelah pasca sukses; (ii) kesulitan untuk mempertahankan komite yang ada; (iii) aset yang lama mengganggu dan using; (iv) longgarnya ikatan sosial. Ringkasnya, setelah pasca sukses pemerintah perlu memberi semangat dan dorongan kepada komunitas Desa Bayangan dengan menjadikan desa ini sebagai desa contoh. Disamping, mengambil anggota komunitas sebagai fasilitator dalam membina desa Gerakan Desa Wawasan lain yang sedang dibina.

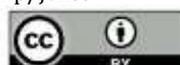
Kata Kunci: Pengembangan Komunitas Desa; Keberlanjutan; Peranan Pemerintah.

Abstract

Community development is an effort to improve the standard of living and quality of life of the community. The Wawasan Village Movement Program is a program that focuses on the development of rural human development towards a village that is more advanced, attractive and profitable. Even though in its implementation, community development is running smoothly and successfully. However, post-success needs to be maintained and sustainable. This article focuses on problems and challenges in the context of rural community development through the Wawasan Village Movement program. This article takes a case study in the Village of Shadow Keningau, Sabah Malaysia. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussions and observations. As well as documentation of published and unpublished materials. The article found several important facilitators who became problems and challenges after the successful implementation of the Village Movement Movement program in Keningau Shadow Village. This includes; (i) no further action from the government after the success; (ii) difficulty maintaining existing committees; (iii) idle and using assets for a long time; (iv) loosening of social ties. In short, after the success of the government, it is necessary to give encouragement and encouragement to the Desa Bayangan community by making this village a model village. In addition, taking community members as facilitators in fostering other Wawasan Village Movement villages that are being fostered.

Keywords: Village Community Development; Sustainability; The Role of Government.

How to Cite: Afrizal, T (2021). Pengembangan Komunitas Pedesaan di Malaysia: Masalah Dan Tantangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 3(3): 1406-1414.



PENDAHULUAN

Umumnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan komunitas ataupun komunitas secara khususnya serta memungkinkan mereka (komunitas) menggunakan potensi untuk membuat perubahan standar hidup. Potensi tersebut mencakup semua kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti memenuhi kebutuhan pokok, hidup yang lebih nyaman, memiliki fasilitas yang lengkap, modern dan canggih, mampu memberikan akomodasi yang lebih baik dengan tingkat keamanan yang tinggi, serta mampu memperoleh makanan bergizi dan kesehatan berkualitas (Azlizan et al., 2009). Konsepsi pembangunan mencakup empat komponen atau tujuan penting yang melengkapi dan perlu dicapai seperti efisiensi (memastikan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat), distribusi kekayaan yang adil (meliputi pemberantasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan pendapatan), berkelanjutan (menjamin pembangunan sekarang tidak mengancam kehidupan generasi mendatang) dan pengayaan rakyat, terutama komunitas miskin (Balwi, 2005.). Dengan kata lain, pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi manusia sehingga tidak ada lagi golongan miskin.

Di Malaysia, pemerintah telah melaksanakan pembangunan komunitas melalui berbagai organisasi atau lembaga. Diantaranya adalah Kelompok Usaha Ekonomi (TEKUN), Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), Yayasan Pengembangan Usaha (YPU), Kemajuan Komunitas (KEMAS), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan lain-lain. Jelas terlihat bahwa pemerintah terus meningkatkan upaya penurunan angka kemiskinan (10MP). Meski demikian, terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sebagian besar literatur membuktikan bahwa kurangnya partisipasi sebagai penyebab gagalnya upaya pembangunan di negara berkembang (World Bank, 1996). Dengan demikian, setiap program pembangunan yang direncanakan harus melibatkan komunitas baik secara langsung maupun tidak langsung karena peranannya sebagai aktor dalam pembangunan (Azlizan, et al., 2009). Melalui partisipasi yang kolektif komunitas desa dapat meningkatkan taraf hidup, akses terhadap fasilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan dan fasilitas sosial lainnya. Selain bertujuan untuk mengurangi permasalahan di komunitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi (Azlizan, et al., 2009).

Dalam konteks Malaysia, pembangunan manusia telah menjadi elemen kunci dalam pembangunan pedesaan, khususnya di masa Transformasi Pedesaan Kedua yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah dengan fokus pada peningkatan kualitas kehidupan pedesaan dan upaya menjadikan pedesaan produktif, menarik, maju dan menguntungkan serta diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan perkotaan. Dengan demikian, Program Gerakan Desa Wawasan (GDW) merupakan mekanisme untuk membentuk komunitas desa yang proaktif, tangguh, inisiatif, mandiri, berwawasan, dan disiplin di pedesaan. Program GDW dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pada tahun 1996. Program ini adalah sebuah program yang konkrit dengan menitikberatkan pada pengembangan pembangunan manusia pedesaan. Melalui program GDW, penglibatan warga desa ditekankan untuk dilibatkan dalam proses perencanaan program pembangunan menuju desa yang lebih maju, menarik dan menguntungkan. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah yang terorganisir dan berkesinambungan untuk mengubah sikap komunitas pedesaan dan budaya pertanian terhadap praktik nilai-nilai komersial dan industri pertanian (Balwi, 2005). Pencapaian kearah Desa Gemilang adalah fokus utama dalam program GDW. Oleh yang demikian, yang menjadi tantangan besar disini bukannya dalam proses mencapai prestasi desa yang maju tetapi setelah pencapaian itu. Situasi yang terjadi di luar ekspektasi anggota komunitas sendiri. Justru, informasi yang terkait dengan kondisi ini sangat bermanfaat untuk perencana program ke depan agar dapat merespon permasalahan yang dihadapi untuk memastikan bahwa program GDW dapat terus berkembang dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Dalam ilmu sosial, konsep komunitas seringkali diterapkan secara longgar dan kita mendapatkan gambaran yang beragam tentang maksud 'komunitas' (Rahman 2007). Bagaimanapun, sosiolog umumnya menganggap komunitas sebagai suatu kesatuan organisasi sosial yang didalamnya terdapat orang-orang dengan wilayah dan unitnya tempat tinggalnya, bekerja mencari nafkah, mengurus keluarga dan anak, serta melanjutkan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Beberapa peneliti menekankan tiga hal. Unsur-unsur penting harus ada bagi masyarakat, yaitu wilayah geografis atau lokalitas, interaksi sosial dan hubungan masyarakat (Poplin 1979) Namun menurut kami perlu ada unsur lain, yaitu rasa kepemilikan dan berbagi kepentingan yang sama dalam kaitannya dengan lokalitas dan hubungan tersebut (Afrizal dan Rahman 2013). Berangkat dari uraian singkat di atas lalu ke dalam Komunitas artikel ini diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik dalam arti bahwa mereka berada di lokasi yang sama, berinteraksi dan menjalin hubungan antar satu sama lain, berbagi pentingnya menjaga hubungan sosial satu sama lain juga berbagi keinginan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan daerah pemukiman dan anggota mereka (Rahman 2007). Anggota masyarakat yang mendiami daerah yang sama tidak serta merta membentuk komunitas secara otomatis jika tidak menjalin interaksi satu sama lain secara terus menerus dan juga tanpa ada rasa memiliki atau kepemilikan hubungan sosial yang saling berhubungan dan sumber daya yang dibangun di dalam lokalitas yang mereka huni. Masyarakat akan memiliki ketahanan bila ada lembaga dan organisasi sosial yang mendukung keberlanjutan masyarakat, seperti lembaga keagamaan dan sosial budaya juga organisasi sosial seperti perkumpulan penduduk, perkumpulan amal dan sebagainya. Dengan kata lain, Salah satu ciri masyarakat adalah memiliki unsur modal sosial seperti kepercayaan, nilai dan norma bersama serta jaringan yang memungkinkan keberlanjutan lembaga-lembaga tersebut (Rahman 2007). Jadi, komunitas lebih kompleks dan berbeda dari satu sekelompok orang di suatu wilayah yang tidak memiliki hubungan dan interaksi itu kontinu. Komunitas dapat disebut sebagai kelompok orang yang memiliki interaksi, saling terkait dan ikatan sosial yang terbentuk antar (individu, keluarga dan kelompok) dalam ruang fisik yang sama serta membangun institusi sosial yang menunjang kehidupan sehari-hari.

Ada definisi berbeda yang diberikan pada konsep pengembangan komunitas karena keragaman disiplin ilmu dalam menerapkan istilah-istilah ini baik terhadap istilah pembangunan atau istilah komunitas itu sendiri. Definisi yang diberikan oleh Cambridge, Inggris pada tahun 1948, pengembangan komunitas terkait dengan gerakan yang bertujuan untuk mempromosikan kehidupan yang lebih baik melalui keterlibatan dan inisiatif mereka sendiri. Sementara itu, makna yang diberikan PBB pada tahun 1956, pengembangan komunitas melibatkan proses yang menggabungkan upaya manusia di masyarakat, upaya badan pemerintah dan lembaga swadaya untuk meningkatkan standar ekonomi, sosial dan budaya komunitas dalam rangka membawa pembangunan ke bangsa secara keseluruhan (Haris dan Hadi, 2012). Pengembangan komunitas mengacu pada upaya peningkatan standar hidup dan kesejahteraan serta kualitas hidup komunitas lokal. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh komunitas atau komunitas bersama dengan agen pembangunan, agen pemerintah atau non-pemerintah. Pengembangan komunitas sebagai strategi pembangunan nasional telah menghasilkan kesuksesan, khususnya dalam program yang direncanakan. Keberhasilan pembangunan ini sangat bergantung pada partisipasi komunitas itu sendiri, serta pendekatan yang tepat yang dipraktikkan oleh praktisi pembangunan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Aziz (2001) menyatakan bahwa pengembangan komunitas merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan mendasar kehidupan manusia. Bagi Shattar (2003), pengembangan komunitas merupakan upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup masyarakat. Sebagai hasil dari analisis multidiskripsi yang diberikan oleh para sarjana tentang pengembangan komunitas, Intyre, G.M, (1999) telah mengidentifikasi lima elemen kunci yang biasanya memiliki relevansi dengan mendefinisikan konsep ini. Hal ini terkadang terkait dengan proses, metode, program, gerakan atau paradigma baru dalam mengimplementasikan aksi sosial menuju perubahan kualitas hidup yang lebih baik terhadap sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, definisi ini merupakan inisiatif yang dilakukan secara



profesional baik oleh instansi pemerintah, swasta, LSM atau komunitasitu sendiri untuk membawa perubahan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan HAM dan kesejahteraan hidup manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Ringkas Desa

Artikel ini berdasarkan dari hasil penelitian di Desa Bayangan, Daerah Keningau, Sabah, Desa Bayangan adalah sebuah desa yang terletak sekitar tujuh kilometer dari kota Keningau. Desa Bayangan memperoleh namanya dari anak sungai yang mengalir di desa kemudian sungai itu diberi nama "Sangai-sangai" yang merupakan kata "Sangai" yang berarti "Bayangan" dalam bahasa Dusun. Desa ini juga masuk dalam salah satu daerah seleksi Majelis Negara yang membentuk Parlemen P.180 Keningau yaitu Majelis Negeri N.34 Liawan. Dua kabupaten seleksi lainnya adalah N.37 Tambunan dan N.33.Bingkor. Negari asal pedesaan ini terdiri dari dua desa Yaitu Desa Shadow dan Desa Purakagis. Menurut Kepala Desa Bayangan, desa ini pertama kali ditempatkan pada penghapusan Rencana Skema tentang Pengembangan Desa yang dilaksanakan oleh Kolonial Inggris pada tahun 1953 di bawah Pembangunan Sosial Ekonomi Sabah. Skema Rencana pengembangan Desa yang dilaksanakan oleh Kolonial Inggris bertujuan untuk menangani kesulitan hutan, relokasi kegiatan pertanian, serta penerapan pertanian subsisten untuk meningkatkan status sosial ekonomi penduduk. Keintiman ini melibatkan komunitasadat dari Kecamatan Ranau dan Tambunan. Populasinya sekitar 1.523 jiwa dari segala usia dan berbagai bidang profesi seperti Guru, Tuan Rumah, aparat Pemerintah dan lainnya. Mayoritas pedesaan adalah etnis Dusun dan 99 persen Muslim.

Program Gerakan Daya Wawasan (GDW)

Hasil wawancara dengan seorang informan tentang pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan (GDW) di Desa Bayangan, Keningau, Sabah dimulai pada masa mantan Perdana Menteri, Tun Dr.Mahathir menyampaikan pidatonya di "Malaysia: The Way Forward" ketika memimpin visi 2020, itu membuat dua prinsip pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan manusia sebagai faktor penting dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Kementerian Pembangunan Pedesaan mempercepat Strategi Filsafat dan Pembangunan pada tahun 2020 yang merupakan inti transformasi kedua dari pengembangan core perkotaan. Hj.Sairin Hj.Karno dibentuk dan SK-nya telah mencakup desa Putih dan Desa Purakagis yang dipimpin oleh Sekretariat Desa kebetulan, mengikuti proposal yang memohon Desa Bayangan menjadi Program Gerakan Desa. Wawasan yang sekarang berubah sebagai Gerakan Daya Wawasan.

Pembentukan Organisasi Pengelolaan

Gerakan Daya Wawasan tidak akan berjalan lancar dan tertib tanpa organisasi pengelola. Restrukturisasi organisasi tidak dibuat sesukahati tetapi didasarkan pada standar yang digariskan oleh pemerintah. Bagi desa yang melaksanakan Program Gerakan Desa Wawasan, yang harus diperhitungkan adalah efektivitas fungsi organisasinya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena organisasi pengelola merupakan mesin untuk semua implementasi proyek yang akan dicapai.

Hal ini sejalan dengan pernyataan (Hall,1996) yang menjelaskan organisasi tersebut adalah kelompok yang memiliki batasan yang jelas, memiliki regulasi, otoritas, sistem komunikasi dan koordinasi anggotanya. Kelompok ini ada secara berkelanjutan dan memiliki kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang menghasilkan hasil baik untuk anggota-anggota organisasi, dan bahkan komunitasnya. Dengan demikian, para penulis melihat bahwa seorang anggota sekretariat dari Gerakan Desa Wawasan bagian dari komunitas di desa Bayangan. Sekretariat GDW didirikan adalah untuk memastikan pelaksanaan program GDW di desa berjalan lancar dan mencapai tujuan seperti; (i) meningkatkan kemampuan komunitas untuk membawa perubahan dan pembangunan Desa yang pesat; (ii) meningkatkan inisiatif, Kerjasama dan partisipasi aktif semua lapisan penduduk dalam mengelola, membangun dan memajukan Desa GDW di Desa Bayangan; (iii) menggunakan segala sumber daya yang ada untuk semua sektor secara berintegrasi kea rah pembangunan GDW Desa Bayangan yang lebih aktif; (iv)



mengoptimalkan pemakaian sumber daya, potensi, kekuatan yang ada di GDW Desa Bayangan ke arah pencapaian ekonomi berkelanjutan dan kestabilan lingkungan Hidup

Untuk rencana yang akan dilaksanakan, GDW Desa Bayangan akan mengadakan pertemuan. Dan membahas perencanaan proyek pembangunan, permasalahan yang timbul juga dibahas. Permasalahan yang sering dibahas adalah masalah keuangan, lingkungan desa (kebersihan), keselamatan dan masalah sosial yang melibatkan anak muda di desa. Struktur organisasi GDW Desa Bayangan, pembagian tugas atau peran untuk setiap anggota komite difungsikan berdasarkan jabatan yang dipegang atau dipegang. Posisi penasihat adalah yang teratas dalam struktur organisasi. Jabatan penasihat dipegang oleh Petugas Distrik Keningau. Kemudian disusul oleh penasihat klasik. Selanjutnya, dilanjutkan dengan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Panel Musyawarah, Sekretaris, Sekretariat dan Bendahara. Kemudian menciptakan beberapa kategori untuk mendukung arah teratas Komite, yaitu, anggota komite yang terdiri dari Ekonomi dan Kewirausahaan, Keamanan, Komunikasi dan Multimedia, HALWA, Mitra Muda, Seni, Budaya, Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi, Agama dan Sosial, Kesehatan, Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan, Lanskap dan Kesejahteraan.

Setiap sektor masing-masing berperan dalam melihat efektivitas Program GDW di desa seperti sektor Lanskap sebagai peran dalam memastikan bahwa lingkungan sekitarnya bersih dan terorganisir. Oleh karena itu, pembentukan komite GDW Desa Bayangan memang memiliki peran besar dalam kemajuan Desa Bayangan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena tanpa semangat kerja sama yang ditunjukkan di antara anggota sekretariat pembangunan dan proyek yang direncanakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi Projek Pengembangan GDW

Gerakan Pedesaan Wawasan (GDW) adalah program yang berfokus pada aspek pembangunan. Hal ini dikarenakan, pembangunan yang dilaksanakan sejalan dengan anjuran pemerintah menjadikan desa sebagai desa maju, menarik dan menguntungkan (Mohd Koharuddin Balwi, 2005). Di antara instansi pemerintah yang membantu memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan GDW di Desa Bayangan Kementerian Pembangunan Desa, Kementerian Penerangan, Kementerian Kesenian dan Pariwisata, Kementerian Pengembangan Tanah dan Koperasi, Kementerian Persepaduan, Kementerian Pembangunan Sumber Daya Manusia, KEMAS, INFRA, serta Dewan Organisasi Tani. Oleh karena itu, selama jangka panjang, implementasi GDW Desa Bayangan akan berfokus pada tiga prinsip utama yaitu fokus, tindakan terpadu (intergrated action) dan ketangkasan usaha berkelanjutan berdasarkan metode berikut:

1. Mensukseskan proses perencanaan *bottom-up planning* di mana semua anggota komunitas (melalui sub GDW yang disebut Taman (sebelumnya disebut Blok) dan melahirkan idea serta bertindak untuk merencanakan dan menyediakan *Master Plan* pengembangan Desa serta *Action Plan* berdasarkan kemampuan dan potensi yang sudah ada.
2. Menjadikan Komite Kompleks Perumahan sebagai penggerak utama untuk membimbing warga desa untuk memajukan desa.
3. Menggunakan segala sumber daya dan energi dari semua sektor secara aktif untuk pengembangan desa iaitu pihak swasta, korporasi, badan-badan bukan pemerintah (NGO), departemen dan agen pemerintah serta warga GDW Desa Bayangan sendiri.

Pengembangan Sosial. Satu fasilitas penting yang dibangun di Desa Bayangan ialah Pusat Medan Info Desa (MID). MID atau MID E-Bayangan adalah sebuah pilot projek yang direncanakan oleh Kementerian Pembangunan Desa di bawah Rancangan Malaysia ke-8 (RMK8) bersama-sama dengan lima desa lain yaitu E-Pak Ngah di Johor, E-Kak Long di Perlis, dan E-Bujang di Kedah. MID atau E-Bayangan mulai beroperasi secara rasmi pada 13 Mei 2001. Antara layanan yang diberikan melalui pusat MID ini adalah membuat pelatihan-pelatihan literasi komputer seperti mengendalikan internet, mengetik, dan mencetak, scanning, photocopy dan sebagainya.

Pengembangan Infrastruktur. Kemajuan sebuah desa bisa dilihat dengan pengembangan infrastruktur yang dibina. Biasanya, sebuah desa dengan sarana prasarana yang lengkap dikatakan sebagai desa maju. Ada lebih dari 23 jenis infrastruktur yang dikembangkan di desa seperti jalan, pasokan air dan listrik, perlengkapan telepon umum dan swasta, masjid, surau, aula



serbaguna, aula komunitas, ruang muafakat, pusat MID, Tadika KEMAS, toko kelontong pedesaan, bus umum, taksi, Sekolah Dasar Agama Islam (SUIS), rumah guru, pos polisi desa. Pembangunan infrastruktur ini dikembangkan di bawah bantuan pemerintah serta dari alokasi dana Desa Bayangan itu sendiri. Sebagian besar fasilitas ini ditingkatkan, baik diperbaiki atau baru dibangun seperti Pusat Medan Info Desa (MID).

Pengembangan dan Perencanaan Ekonomi Dalam Tiga Sektor Utama. Pengembangan dan perencanaan perekonomian didasarkan pada tiga komponen utama yaitu bisnis, industri dan pariwisata. Komunitaspedesaan di desa ini melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan mereka. Keterlibatan warga desa Bayangan di bidang bisnis telah berlangsung begitu lama. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan usaha ritel yang dijalankan oleh beberapa warga desa. Sejauh ini saja, sekitar sepuluh toko kelontong ditemukan di desa ini. Hal ini dikerjakan oleh upaya komunitasdesa sendiri dengan modal sendiri. Kegiatan ekonomi lainnya yang diselenggarakan oleh komunitasdesa adalah Jasa Pembela, Perusahaan Grosir, Perusahaan Kontraktor, Perusahaan Konstruksi, Operator Bengkel, Perusahaan Transportasi, Restoran, Pemasok Makanan dan Toko Jahit.

Di samping itu, kegiatan ekonomi yang melibatkan kegiatan industri mengacu pada perusahaan yang melibatkan industri produksi makanan ringan seperti keripik dan kue serta industri pembuatan sambal. Industri kerajinan tangan, pembuatan pot bunga, dan pembuatan kursi dan meja yang terbuat dari ban kendaraan yang dibuang juga sedang dilakukan. Mega proyek yaitu Proyek Pariwisata Aqua dan proyek pariwisata seperti penyediaan fasilitas taman rekreasi, *camp camp centre*, pusat pelatihan, Kawasan memancing, *homestay*, dan pusat kebudayaan juga dilakukan di desa. Semua proyek ini dikerjakan bekerja sama antara Desa Bayangan dan Koperasi Gerakan Desa Wawasan Desa Bayangan.

Aktivitas Sosioekonomi

Sejalan dengan pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan, pemerintah berharap warga pedesaan dapat melampaui garis kemiskinan berdasarkan tiga komponen utama Gerakan Daya Wawasan yaitu Daya manusia, Kekuatan Ekonomi, dan Kekuatan Pasar. Oleh karena itu, program ini memastikan bahwa penduduk memiliki kegiatan usaha sendiri dan tidak bergantung pada pendapatan dari sektor perkebunan tetapi dari sektor peternakan (peternakan sapi, kambing, kerbau, ayam desa, bebek dan ikan air tawar) dan bisnis ritel serta pariwisata seperti *homestay*.

Sebelum pelaksanaan program GDW di Desa Bayangan, komunitas Desa Bayangan telah menghadapi berbagai tantangan untuk mengembangkan desa. Permasalahan tersebut melibatkan permasalahan internal desa. Misalnya, perencanaan pembangunan yang melibatkan sektor ekonomi, Mega Project. Menurut informasi, selama pelaksanaan GDW yang masih aktif di desa, Proyek Mega yang dikembangkan terganggu selama beberapa kali. Masalahnya dikaitkan dengan masalah kontraktor. Kontraktor dikatakan telah menunda proses pengembangan proyek sampai terlihat ditinggalkan. Selain itu, permasalahan keuangan juga dipandang sebagai hambatan bagi upaya pembangunan di desa. Kurangnya sumber daya menyebabkan berbagai perencanaan pembangunan terganggu dan sulit dilanjutkan. Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini, komunitasberupaya untuk mendapatkan alternatif sumber daya keuangan dengan memperluas sektor ekonomi yang ada sehingga dapat memberikan imbal hasil yang baik seperti sektor pertanian.

Masalah lain yang timbul adalah terkait dengan sistem birokrasi. Permasalahan yang dihadapi komunitas adalah mendapatkan kerja sama dari badan pemerintah yang terlibat dalam melancarkan upaya pembangunan. Ada masalah birokrasi yang dihadapi oleh komunitas, disamping harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi akan memakan waktu lama untuk proses permohonan yang diperlukan misalnya, permohonan izin usaha, hibah tanah, dan hal-hal lain yang melibatkan manajemen formal. Menurut Sekretariat Desa penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menciptakan kerja sama antara komunitas dengan instansi pemerintah terkait.



Namun demikian, semangat persatuan, kerjasama dan tanggung jawab antar komunitas di desa ini awalnya menghasilkan pencapaian tujuan dan tujuan yang ditetapkan untuk mengembangkan desa. Lebih lanjut, kesadaran akan pentingnya pembangunan dan perubahan yang dapat mengubah gaya hidup menandakan bahwa tujuan atau tujuan yang ditetapkan di Kampung Manusia Berjaya tercapai. Keberhasilan ini dibuktikan ketika ada kerja sama dari semua pihak, khususnya Anggota Exco Desa terpilih yang sebelumnya dikenal sebagai AJK (Anggota Komite Desa) serta kerja sama antar komunitas di desa. Setiap anggota memainkan peran dan tanggung jawab mereka sendiri untuk membuat program ini sukses.

Berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa ini berdampak pada perubahan gaya hidup komunitas di desa ini. Perubahan gaya hidup dimaksudkan melibatkan perubahan ekonomi, administrasi dan sosial. Perubahan ekonomi dalam hal ini ketidakbergantungan komunitas desa ini pada satu sumber pendapatan. Mereka juga menggali sumber-sumber ekonomi lain untuk membantu meningkatkan pendapatannya. Misalnya, selain berpendapatan dari gaji dari pekerjaan formal mereka menjalankan aktivitas peternakan, pertanian, bisnis dan lain-lain. Hal ini berbeda dengan Program GDW yang dilaksanakan di beberapa desa di semenanjung, Malaysia seperti dalam tulisan Balwi dkk., (2001), tantangan terbesarnya adalah mengubah paradigma subsidi yang telah mengakar. di benak masyarakat pedesaan. Pemikiran mereka selama ini adalah bahwa jika suatu pembangunan akan dilaksanakan di daerahnya, tentunya pembangunan akan dilakukan oleh pemerintah atau dilaksanakan oleh pemerintah dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya (pembangunan secara top-down). Hal ini juga dibuktikan dengan tulisannya yang menemukan bahwa kesulitan masyarakat pedesaan berubah dari paradigma lama ke paradigma baru. Sejak program GDW diperkenalkan pada tahun 1996, hampir separuh dari 3300 desa peserta program gagal membangun desanya melalui kegiatan sosial dan ekonomi seperti yang ditentukan (Balwi et al., 2001). Namun konteks desa Bayangan justru sebaliknya. Desa Bayangan dapat mencapai maksud dan tujuan desa hingga akhirnya desa ini meraih Anugerah Istimewa Desa Gemilang (AKDG) pada tahun 2008.

Namun, semuanya berubah karena tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah setelah dianugerahi Anugerah Khusus Desa Gemilang (AKDG) pada tahun 2008. Keadaan ini di luar ekspektasi komunitas Kampung Bayangan. Pernyataan ini dikemukakan oleh ketua GDW desa. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah melanjutkan keunggulan desa karena merupakan tugas yang besar dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Selain itu, desa tersebut tidak akan lagi dilibatkan dalam kompetisi apapun yang melibatkan program GDW selama lima tahun. Bagi para pemimpin desa, tantangan yang lebih besar baru saja dimulai. Tantangannya adalah bagaimana organisasi desa mempertahankan konsep persatuan dan memanfaatkan ganjaran yang diterima dari kemenangan yang diraih. Kelanjutan yang dimaksud disini adalah bagaimana mengedepankan nilai semangat kerjasama yang kuat dan sifat tanggung jawab diantara komunitas di desa ini dalam menjaga nama baik desa ini. Di antara tantangan yang dihadapi masyarakat setelah meraih Anugerah Khusus Desa Gemilang (AKDG) tahun 2008 adalah:

Tiada Aksi Lanjutan, Pasca meraih Anugerah Khusus Pedesaan Gemilang Nasional (AKDG) di akhir tahun 2008, desa ini tidak lagi diikutsertakan dalam kompetisi apapun yang melibatkan program GDW selama lima tahun. Komunitas desa berpendapat bahwa desa ini telah berhasil mendapatkan penghargaan dan mereka (masyarakat) tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk membangun desa. Misalnya, untuk memelihara Kampung Bayangan yang terkenal dengan desanya yang bersih, ceria, asri, tertib dan memiliki berbagai kegiatan ekonomi, tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak akan mempedulikannya lagi. Dalam hal ini juga komunitas desa seperti kehilangan semangat untuk melanjutkan keunggulan desa. Jika ada tindak lanjut dari aparat kecamatan untuk menjadikan desa Bayangan sebagai role model desa GDW yang berhasil di Sabah kemungkinannya dapat membangkitkan semangat. Kelanjutan yang dimaksud disini adalah menjadikan komunitas desa Bayangan sebagai fasilitator ke desa GDW lainnya.

Melihat skenario ini, komunitas di desa Bayangan membutuhkan dukungan dan dorongan dari aparat pemerintah terkait. Mereka membutuhkan dorongan dari segi psikologis yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan masyarakat. Hal ini juga dikemukakan



oleh Scheyvens (1999), ia mengategorikan ke dalam empat aspek kekuasaan yaitu kekuatan ekonomi, psikologis, sosial dan politik

Kesulitan Untuk Mempertahankan Komite Yang Ada, Mempertahankan anggota komite yang ada menjadi tantangan karena setiap anggota komite perlu dijaga agar tidak terjadi benturan tugas dan retensi tersebut dipandang sesuai karena setiap anggota memiliki pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Namun, tantangan yang paling sulit adalah menarik generasi muda untuk memimpin kepemimpinan desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua GDW Desa Bayangan bahwa generasi muda di desa ini kurang berminat untuk melanjutkan warisan kepemimpinan dan kesuksesan yang telah dinikmati. Akibat kesibukan bekerja dan belajar di luar daerah, generasi muda kurang terpapar pada pengelolaan dan tugas atau pekerjaan yang melibatkan desa. Ia menambahkan, semangat kerjasama antar generasi muda saat ini tidak sama dengan generasi sebelumnya.

Aset GDW Menjadi Mengganggu dan Usang, Desa Bayangan dulunya adalah desa yang sukses dan dikenal dengan semangat persatuan dan kerjasama yang erat antar anggota komunitasnya. Terutama dalam mengembangkan proyek pembangunan. Salah satu keberhasilan terbesarnya adalah objek wisata di masa lalu. Produk pariwisata yang pernah ditawarkan antara lain homestay, kolam ikan untuk memancing, bersepeda di danau, dan challets. Namun demikian, situasi saat ini telah berubah dimana produk pariwisata yang ditawarkan seperti challets menjadi usang dan terbengkalai. Begiru juga dengan usaha yang lainnya seperti kolam ikan dan fasilitas-fasilitas yang sebelum ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Longgarnya Ikatan Sosial, Melihat skenario keberhasilan pada suatu waktu, komunitas di desa Bayangan memang memiliki ikatan sosial yang kuat. Keberhasilan implementasi program GDW di Desa Bayangan karna keterlibatan kolektif di antara anggota komunitas desa. Keterlibatan kolektif dalam program GDW merupakan produk sosial yang dihasilkan dari pembangunan modal sosial. Pada prinsipnya pembangunan modal sosial juga hadir dari proses pemberdayaan modal sosial dalam jangka panjang (Afrizal 2016). Ringkasnya, proses pemerksaan modal sosial di Kampung Bayangan telah terbangun melalui pemantapan unsur-unsur rasa kepercayaan, rasa kepemilikan, solidarity sosial, jaringan sosial dan semangat kesalingan (Putnam, 2000). Ini sejalan dengan pembentukan Exco Gerakan Daya Wawasan Desa Bayangan. Pemberdayaan modal sosial melalui GDW anggota sekretariat Desa Bayangan terjadi bersama komunitas dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan olahraga. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan hari keluarga, gotong royong dan kegiatan lainnya.

SIMPULAN

Pelaksanaan Program Gerakan Desa Wawasan di Desa Bayangan telah memberikan manfaat bagi komunitas di desa tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai proyek pembangunan yang telah dilaksanakan berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat di desa ini. Perubahan gaya hidup yang dimaksud di sini melibatkan perubahan ekonomi, administrasi, dan sosial. Komunitas desa ini tidak mengandalkan pendapatan ekonomi dari satu sumber tetapi mencoba menggali sumber-sumber baru yang dapat lebih meningkatkan pendapatannya. Komunitas desa juga semakin membuka kesempatan terhadap pengelolaan ekonomi yang lebih dinamis dan menantang. Sebab, perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan program GDW lebih menekankan pada aspek perencanaan ekonomi yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan di desa harus dinikmati bersama. Namun demikian, kondisi tersebut semua berubah pasca Desa Bayangan mendapat gelar sebagai Desa Gemilang di Malaysia. Semua yang mereka usahakan sebelumnya terus menurun. Ini karna tidak konsistennya komunitas dalam menjaga apa yang telah mereka ada. Dalam hal ini juga pihak pemerintah tidak seterusnya memberi semangat dan dorongan kepada komunitas dengan menjadikan Desa aini sebagai desa contoh dan menjadikan para anggota komite Desa Wasawan disini sebagai fasilitator untuk desa-desa GDW lainnya di Malaysia.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T., (2016). Pengurusan Sisa Pepejal di Malaysia: Pendekatan Komuniti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Afrizal, T., dan Embong, A.R., (2013). Komuniti dan Pengurusan Persekitaran: Beberapa Pengalaman MALAYSIA, BANGLADESH, ZAMBIA DAN VIETNAM. *Kajian Malaysia* Vol. 31(2): 65–86
- Aziz, R.A., (2001). Pengantar Sosiologi: Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Balwi, M.K.B.H., (2001). Gerakan Daya Wawasan (GDW) sebagai pemangkin pembinaan nilai-nilai proaktif, kreatif, inovatif dan cemerlang komuniti luar
- Balwi, M.K.B.H., (2005). Pembangunan Luar Bandar di Malaysia: Gerakan Desa Wawasan (GDW) Sebagai Mekanisme Pembangunan KomunitasLuar Bandar. *Jurnal Teknologi*, 42 (E) Jun. 31-48.
- Embong, A.R. (2007). Pembangunan Negara, Komuniti dan Insan Melampaui 2020. Bangi: Instituti Kajian Malaysia dan Antarabangsa, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Hall, S. (1999). *Questions of Cultural Identity*. Sage : London
- Poplin, D. (1979). *Communities: A survey of theories and methods of research*. 2nd. New York: MacMillan Publishing Co
- Putnam, R.. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York
- Sabran, M.A.. (2003). Model Pembangunan Komuniti. *Pertanika J.Soc. Sci. & Hum.* 11(2): 135-145.
- Scheyvens, R. (1999). Ecotourism and the empowerment of local communities. *Tourism Management* 20: 245—249
- Talib, A.B.. (2009). Penyertaan Komuniti Luar Bandar Dalam Bidang Keusahawanan Melalui Program Gerakan Daya Wawasan (GDW). *PROSIDING PERKEM IV, JILID 2*. ISSN: 2231-962X
- Wahab, H.A. & Zakaria, A.H., (2012). Desentralisasi kuasa dan pencapaian program pembangunan komuniti luar bandar di Malaysia. *Sarjana*, 25(2), 43-60.
- World Bank. (2003). *Scaling up for poverty reduction. (Module 1.,Agricultural Investment Sourcebook)*. Washinton, DC: World Bank.

